



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 45);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 45) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 70

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 45  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA  
KERJA INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

<i>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</i>	1

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah di tetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	2
--	---

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

<i>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</i>	3
--	---



- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	5
---	---

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	7

- Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3)
  31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
  32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
  33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	8
---	---

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Garut Tahun 2023 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut;

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Perubahan rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Garut Tahun 2023.

<i>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</i>	9
--	---

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Bab ini berisi penjabaran mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut s.d. Triwulan II Tahun 2023.

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat s.d Triwulan II Tahun 2023

### 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	10
--	----

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

<i>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</i>	11



## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

##### 2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

<i>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</i>	12
--	----

**Tabel 2.1**

**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program  
Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024  
Sampai Triwulan II Tahun 2023**

	<b>URUSAN DAN PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI APBD TW II TAHUN 2023</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>URUSAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH</b>	<b>44.367.399.000</b>	<b>30.55</b>	<b>13.556.185.545</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>31.729.208.000</b>	<b>27.90</b>	<b>8.853.978.745</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>11.213.851.000</b>	<b>36.52</b>	<b>4.095.514.000</b>
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>1.424.340.000</b>	<b>42.59</b>	<b>606.692.800</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.367.399.000</b>	<b>30.55.73</b>	<b>13.556.185.545</b>

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 44.367.399.000,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.417.909.335,00 atau sebesar 25,73%.

### **2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA**

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat

<i>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</i>	13
--	----

diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 39,38% untuk target kinerja dan 42,29% untuk target anggaran.

**Tabel 2.2**

**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program  
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024  
Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
URUSAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH	39.38%	42.29%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26%	43.73%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	38%	42.78%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	36%	27.18%
<b>JUMLAH</b>	<b>39.38%</b>	<b>42.29%</b>

## 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

### 2.2.1 Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

<i>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</i>	14
--	----

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran**  
**RENJA Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi	% Realisasi thd Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	3
URUSAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH	32.052.569.835	42.29	13.556.185.545
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.246.319.435	43.73	8.853.978.745
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	9.573.727.400	42.78	4.095.514.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.232.523.000	27.18	606.692.800
<b>JUMLAH</b>	<b>32.052.569.835</b>	<b>42.29</b>	<b>13.556.185.545</b>

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 42.29%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

### 2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 39,38% untuk target kinerja, dan 42,29% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

**Tabel 2.4**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program**  
**Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
URUSAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH	39.38%	42.29%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26%	43.73%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	38%	42.78%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	36%	27.18%
<b>JUMLAH</b>	<b>39.38%</b>	<b>42.29%</b>

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)**  
**Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Inspektorat**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
									K	Rp.	K	Rp.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Sangat Baik	115.270.822.751	Level 3	19.950.711.397	Level 3	20.246.319.435	Level 3	8.853.978.745	36%	42.29%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	500.924.000	19 Dokumen	136.138.100	8 Dokumen	167.458.600	3 Dokumen	19.380.100	20%	14.10%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	32 Dokumen	107.637.000	8 Dokumen	56.179.000	8 Dokumen	53.752.800	2 Dokumen	19.380.100	25%	36.05%

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	17
--	----

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
									K	Rp.	K	Rp.
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Hasil Survei	4 Dokumen	393.287.000	1 Dokumen	79.959.100	1 Dokumen	113.705.800	-	0	-	0%
		2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	24 Dokumen		6 Dokumen							
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>386 Orang</b>	<b>65.916.125.092</b>	<b>97 Orang</b>	<b>16.235.732.896</b>	<b>97 Orang</b>	<b>15.214.657.999</b>	<b>95 Orang</b>	<b>7.925.636.127</b>	<b>58%</b>	<b>52.09%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	386 Orang	65.864.405.092	97 Orang	16.220.232.896	97 Orang	15.167.047.999	95 Orang	7.878.026.127	58%	51.94%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	4 Dokumen	51.720.000	1 Dokumen	15.500.000	1 Dokumen	47.610.000	1 Dokumen	47.610.000	100%	100%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Tenaga Keamanan</b>	<b>24 Orang</b>	<b>639.550.818</b>	<b>6 Orang</b>	<b>148.549.308</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>185.239.880</b>	-	-	-	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan	24 Orang	639.550.818	6 Orang	148.549.308	1 Dokumen	185.239.880	-	-	-	-

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	18

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
									K	Rp.	K	Rp.
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>7.366.957.000</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>1.675.855.200</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>2.307.560.800</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>86.060.000</b>	<b>20%</b>	<b>4.08%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Lapangan	440 Buah	738.996.000	110 Buah	187.618.000	110 Paket	197.264.800	-	-	-	-
		2. Jumlah Pakaian Batik	960 Buah		240 Buah							
		3. Jumlah Pakaian Korpri	440 Buah		110 Lembar							
		4. Jumlah Pakaian Olahraga	440 Stel		110 Stel							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Auditor yang Mengikuti Sertifikasi Profesi	40 Orang	6.627.961.000	10 Orang	1.488.237.200	97 Orang	2.110.296.000	2 orang	86.060.000	3%	4.08%
		2. Jumlah Pelatihan yang diikuti	5 Jenis Diklat		5 Jenis Diklat							

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	19
--	----



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
									K	Rp.	K	Rp.
		3. Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan	7 Pelatihan		7 Kali	-						
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>4.422.813.000</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>1.163.317.745</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>1.673.521.900</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>674.047.758</b>	<b>48%</b>	<b>40.28%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	31.354.000	7 Jenis	7.277.000	1 Paket	15.446.700	1 Paket	10.167.400	57%	65.82%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59 Jenis	946.352.000	59 Jenis	313.593.145	1 Paket	707.636.000	26 Jenis	234.716.900	61%	33.17%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	34.342.000	7 Jenis	7.927.400	1 Paket	24.876.800	7 Jenis	23.660.000	100%	95.11%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	889.616.200	7 Jenis	204.003.000	2 Paket	232.572.000	4 Jenis	108.930.800	60%	46.84%
		2. Jumlah Penggandaan /FC	1.482.328 Lembar		370.582 Lembar	-						

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	20
--	----

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
									K	Rp.	K	Rp.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Bahan Bacaan/Surat Kabar	3 Jenis	45.226.200	3 Jenis	10.070.000	3 Jenis	49.305.000	3 Jenis	6.180.000	85%	12.53%
		2. Jumlah Publikasi di Media Cetak	20 Kali		5 Kali	-						
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	42.400 Orang	969.750.000	10.600 Orang	224.680.500	4 Laporan	261.250.000	3.498 Orang	106.194.649	38%	40.65%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.200 OH	1.506.172.000	300 OH	395.766.700	4 Laporan	355.782.000	82 OH	184.198.009	32%	51.77%
		2. Jumlah Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	800 OH		200 OH							
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-			1 Dokumen	26.653.400	-	-		-

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	21
---	----

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
									K	Rp.	K	Rp.
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>496.500.000</b>	-	-	<b>1 Unit</b>	<b>299.769.200</b>		-		-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeulair	3 Set	496.500.000	-	-	1 Unit	299.769.200	-	-		-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>4 Poin</b>	<b>1.308.835.500</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>240.314.949</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>287.171.050</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>42.795.427</b>	<b>47%</b>	<b>14.90%</b>
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat/materai	4.800 Buah	25.860.000	1200 Buah	4.950.000	4 Laporan	10.088.800	2 Laporan	3.621.400	55%	35.90%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	624.948.200	4 Jenis	82.530.919	4 Laporan	99.525.000	2 Laporan	29.580.063	55%	29.72%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang Diperbaiki	144 Unit	107.054.000	36 Unit	24.830.000	4 Laporan	30.220.000	2 Laporan	9.593.964	28%	31.75%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
									K	Rp.	K	Rp.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Tenaga Kebersihan	12 Orang	350.973.300	3 Orang	128.004.030	1 Laporan	147.337.250	-	-	-	-
		2. Jumlah Alat Kebersihan	24 Per Ruang		6 Per Ruang	-						
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>34.619.123.341</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>202.967.104</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>110.940.000</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>35.811.060</b>	<b>27%</b>	<b>32.28%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Surat Izin Kendaraan Dinas/Operasional	167 Unit	418.920.000	38 Unit	100.736.450	43 Unit	110.940.000	14 Unit	35.811.060	37%	32.28%

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		
									K	Rp.	K	Rp.	
		2. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan	77 Unit		5 Unit	-				-	-	-	
		3. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan	66 Unit		9 Unit	-				-	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	1 Gedung	34.200.203.341	-	102.230.654	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>42.937.909.000</b>	<b>70%</b>	<b>7.462.982.670</b>		<b>9.573.727.400</b>		<b>4.095.514.000</b>	<b>42%</b>	<b>42.78%</b>	
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>38.303.992.000</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>5.824.802.170</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>7.813.119.900</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>3.390.249.000</b>	<b>46%</b>	<b>43.39%</b>	

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	
	24

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
									K	Rp.	K	Rp.
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	300 Laporan	15.710.328.000	75 Laporan	3.423.774.110	75 Laporan	3.658.939.900	12 laporan	1.089.711.000	0%	29.78%
		2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	3 Jenis		2 Jenis	-			1 Jenis		33%	
		3. Jumlah Laporan Hasil Reviu	5 Jenis		5 Jenis	-			3 Jenis		60%	
		4. Jumlah LHE	16 Jenis		4 Jenis	-			1 Jenis		25%	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	5 Jenis	12.482.804.000	2 Jenis	1.250.527.630	5 Laporan	990.325.000	1 Jenis	281.375.000	50%	28.41%
		2. Jumlah LHR	7 Jenis		7 Jenis	-			2 Jenis		14%	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHR	4 Laporan	96.650.000	1 Laporan	17.695.000	1 Laporan	20.500.000	1 Laporan	16.925.000	100%	82.56%
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR	2 Jenis	1.074.267.000	2 Jenis	183.850.000	2 Laporan	217.880.000	2 Jenis	200.078.000	100%	91.83%
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	1684 LHP	5.044.424.000	421 LHP	947.910.000	168 Laporan	2.109.700.000	96 LHP	1.446.900.000	50%	68.58%

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	25
---	----

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
									K	Rp.	K	Rp.
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Berita Acara Tindak Lanjut	1999 BAT	3.895.519.000	500 BAT	1.045.430.000	500 Dokumen	815.775.000	134 BAT	355.260.000	27%	43.55%
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>4.633.917.000</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>1.638.180.500</b>	<b>8 Laporan</b>	<b>1.760.607.500</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>705.265.000</b>	<b>38%</b>	<b>40.06%</b>
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	32 Laporan	4.633.917.000	8 Jenis	1.638.180.500	8 Laporan	1.760.607.500	3 Jenis	705.265.000	38%	40.06%
	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan</b>	<b>91%</b>	<b>5.443.281.000</b>	<b>85%</b>	<b>1.635.625.000</b>		<b>2.232.523.000</b>	<b>85%</b>	<b>606.692.000</b>	<b>39%</b>	<b>27.18%</b>

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	26
---	----

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
									K	Rp.	K	Rp.
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>1.155.457.800</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>319.049.000</b>	<b>1 Rumusan</b>	<b>529.243.000</b>		<b>109.950.000</b>		<b>20.77%</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	12 Laporan	1.155.457.800	3 Laporan	319.049.000	3 Rekomendasi	529.243.000		109.950.000		20.77%
	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>16 Kegiatan</b>	<b>4.287.822.200</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>880.514.350</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>1.703.280.000</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>496.742.800</b>	<b>39%</b>	<b>29.16%</b>
	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	8 Jenis	964.793.000	2 Jenis	99.840.000	75 Perangkat Daerah	247.095.000		-		-
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,	4 Dokumen	376.478.000	1 Dokumen	81.700.000	15 Perangkat Daerah	228.473.000	1 Dokumen	-	-	-



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
									K	Rp.	K	Rp.
		dan Penilaian Reformasi Birokrasi										
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Jumlah kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi	5 Jenis	1.574.529.200	2 Jenis	403.419.350	1 Kegiatan	998.867.500	1 Jenis	412.873.000	50%	41.33%
		2. Jumlah kegiatan sapu bersih pungutan liar	5 Jenis		2 Jenis	-			1 Jenis		50%	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	12 Jenis	1.372.023.000	3 Jenis	295.555.000	8 Perangkat Daerah	228.844.500	1 Jenis	83.869.800	33%	36.65%
		2. Jumlah Survei Penilaian Integritas	4 Kali		1 Kali	-					-	
	<b>Jumlah</b>					<b>29.657.641.987</b>		<b>32.052.569.835</b>		<b>13.556.184.745</b>	<b>39.38%</b>	<b>42.29%</b>

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	28
---	----

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.32.052.569.835,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 13.556.184.745,00 atau mencapai 42.29%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

**Tabel 2. 6**

**Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023  
sampai dengan triwulan II**

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>9.573.727.400</b>	<b>4.095.514.000</b>	<b>42.78</b>
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>7.813.119.900</b>	<b>3.390.249.000</b>	<b>43.39</b>
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.658.939.900	1.089.711.000	29.78
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	990.325.000	281.375.000	28.41
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	20.500.000	16.925.000	82.56
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	217.880.000	200.078.000	91.83
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	2.109.700.000	1.446.900.000	68.58
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	815.775.000	355.260.000	43.55
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>1.760.607.500</b>	<b>705.265.000</b>	<b>40.06</b>
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.760.607.500	705.265.000	40.06

<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>2.232.523.000</b>	<b>606.692.800</b>	<b>27.18</b>
<b>6.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>529.243.000</b>	<b>109.950.000</b>	<b>20.77</b>
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	529.243.000	109.950.000	20.77
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1.703.280.000</b>	<b>246.742.800</b>	<b>14.49</b>
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	247.095.000	0	0
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	228.473.000	0	0
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	998.867.500	162.873.000	21.75
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	228.844.500	83.869.800	36.65
<b>6.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.246.319.43 5</b>	<b>8.853.978.745</b>	<b>43.73</b>
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>167.458.600</b>	<b>19.380.100</b>	<b>11.57</b>
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen	53.752.800	19.380.100	36.05

	Perencanaan Perangkat Daerah			
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.705.800	0	0
<b>06.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.214.657.999</b>	<b>7.925.636.127</b>	<b>52.09</b>
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.167.047.999	7.878.026.127	51.94
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.610.000	47.610.000	100
<b>6.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>185.239.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	185.239.886	0	0
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.307.560.800</b>	<b>86.060.000</b>	<b>3.73</b>
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	197.264.800	0	0
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.110.296.000	86.060.000	4.08
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.673.521.900</b>	<b>674.047.758</b>	<b>40.28</b>
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.446.700	10.167.400	65.82
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	707.636.000	234.716.900	33.17
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.876.800	23.660.000	95.11

6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	232.572.000	108.930.800	46.84
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	49.305.000	6.180.000	12.53
6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	261.250.000	106.194.649	40.65
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.782.000	184.198.009	51.77
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.653.400	0	0
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>299.769.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	299.769.200	0	0
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>287.171.050</b>	<b>113.043.700</b>	<b>39.36</b>
6.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	10.088.800	3.621.400	35.90
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.525.000	29.580.063	29.72
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.220.000	9.593.964	31.75
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.337.250	70.248.273	47.68
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>110.940.000</b>	<b>35.811.060</b>	<b>32.28</b>

6.1.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.940.000	35.811.060	32.28
----------------	---	-------------	------------	-------

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 masih di bawah 50%.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Inspektorat selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan.

### 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Inspektorat sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Inspektorat Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pengawasan, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27), dan sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 144 Tahun 2019

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Maka dari itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah dituntut untuk selalu dinamis dengan mengadakan berbagai penyesuaian dan perubahan serta berorientasi pada pembaharuan terutama melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang tentunya ini menjadi tugas berat yang diemban oleh seorang pimpinan Inspektorat Daerah, dalam hal ini adalah Inspektur Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, Inspektur Daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	35



Adapun fungsi yang diemban oleh Inspektur Daerah, dalam mewujudkan tugas pokok tersebut Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dibantu oleh unit kerja yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan tugas pokok tujuan organisasi, antara lain :

- a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

- b. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan.

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :

- 1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- 2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- 5) Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu di bantu oleh kelompok Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD), dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawain.

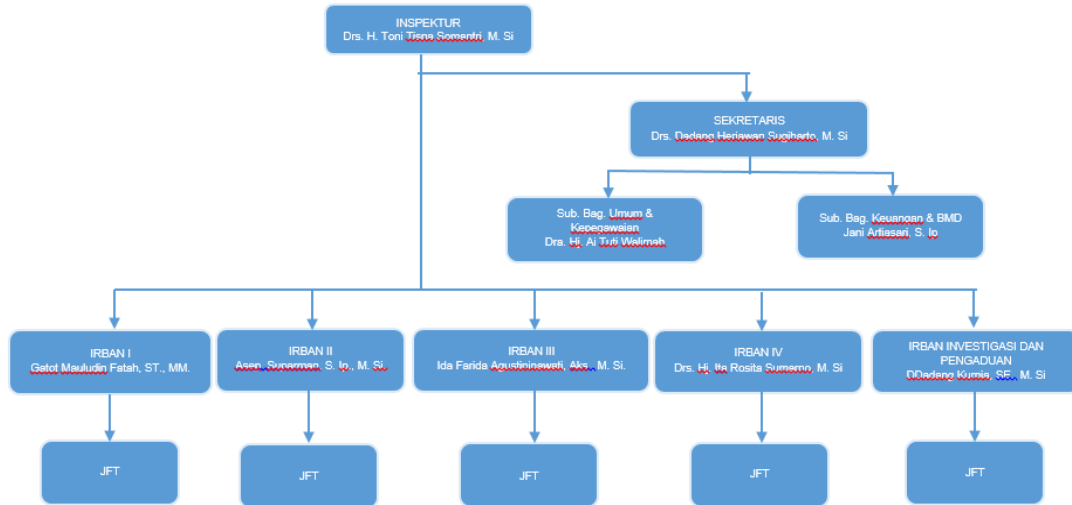
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi.

Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah jabatan fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya. Dan untuk jenjang dan jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 sebagai berikut :

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Garut:



Berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, komposisi pegawai Inspektorat Daerah Garut per Desember 2022 :

**1. Komposisi SDM Inspektorat**

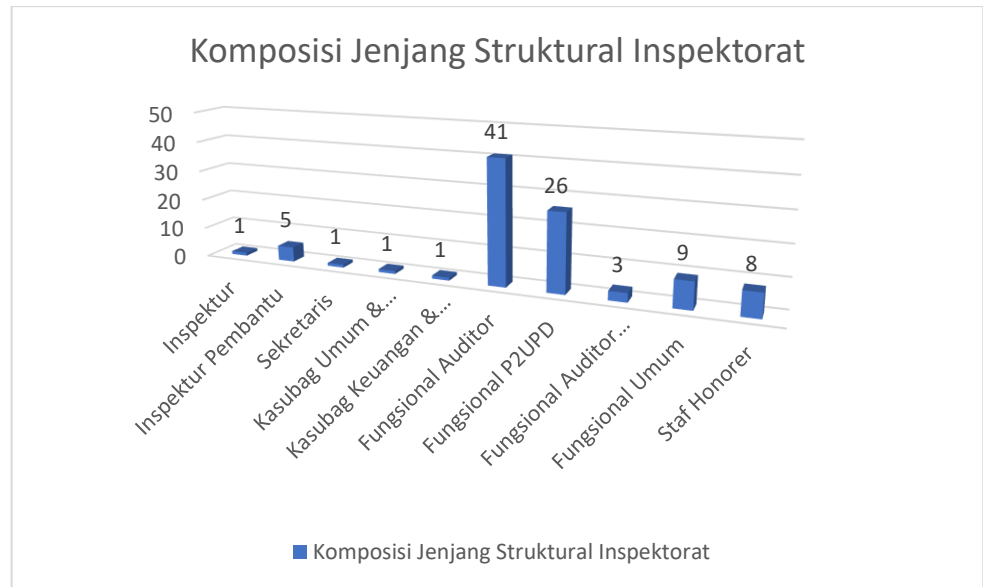
Sebaran sumber daya pegawai yang ada di unit kerja Inspektorat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3  
Komposisi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Garut

No.	Status	Jumlah (Orang)
1.	Jenjang Struktural	9
2.	Fungsional Auditor	41
3.	Fungsional P2UPD	26
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	3
5.	Fungsional Umum	9
6.	Staf Honorer	8

## 2. Komposisi Jabatan Struktural Inspektorat

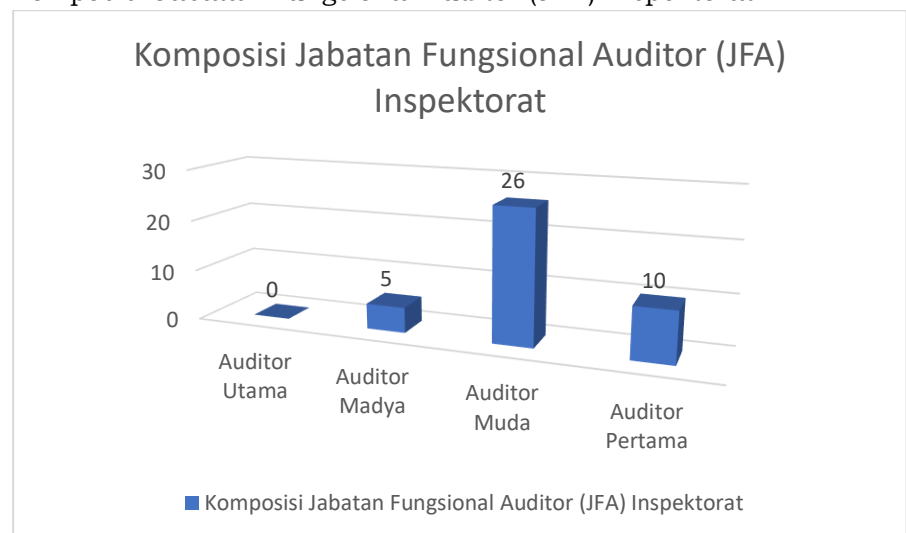
Gambar 2.4  
Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat



## 3. Jabatan Fungsional Auditor

Komposisi jabatan fungsional auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Gambar 2.5  
Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat

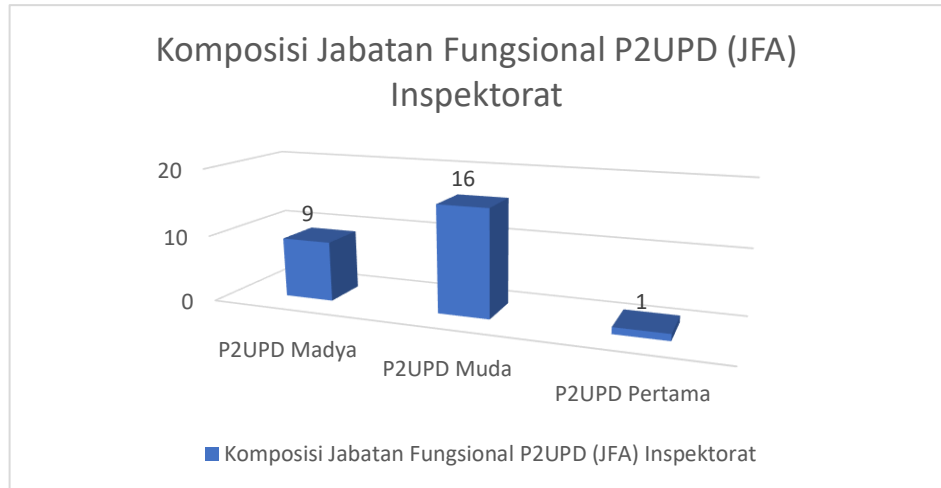


Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan untuk jabatan auditor pertama. Dengan demikian, dalam tim mandiri penugasan kepada ketua tim banyak diperankan

sebagai anggota tim untuk memenuhi komposisi anggota dalam tim mandiri.

#### 4. Jabatan Fungsional P2UPD

Gambar 2.6  
Komposisi Jabatan Fungsional P2UPD Inspektorat

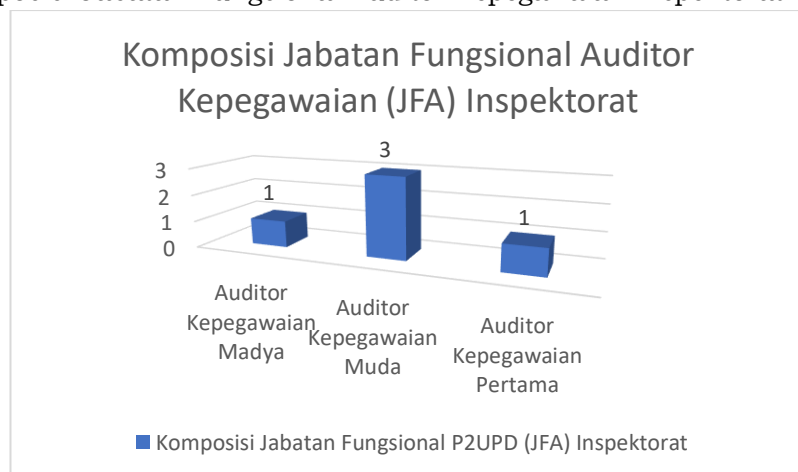


Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan untuk jabatan P2UPD pertama. Dengan demikian, dalam tim mandiri penugasan kepada ketua tim banyak diperankan sebagai anggota tim untuk memenuhi komposisi anggota dalam tim mandiri.

#### 5. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Komposisi jabatan fungsional auditor kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

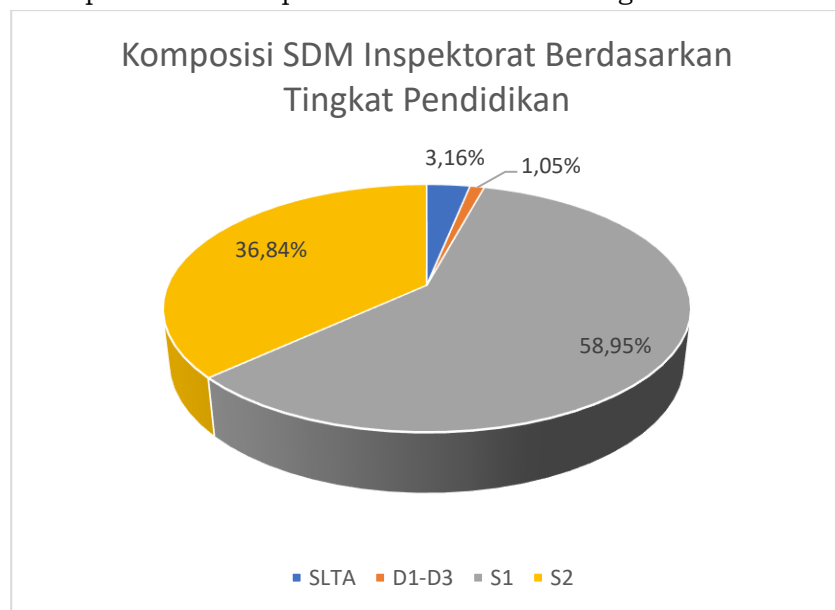
Gambar 2.7  
Komposisi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Inspektorat



Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan untuk jabatan auditor kepegawaian pertama. Dengan demikian, dalam tim mandiri penugasan kepada ketua tim banyak diperankan sebagai anggota tim untuk memenuhi komposisi anggota dalam tim mandiri.

## 6. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

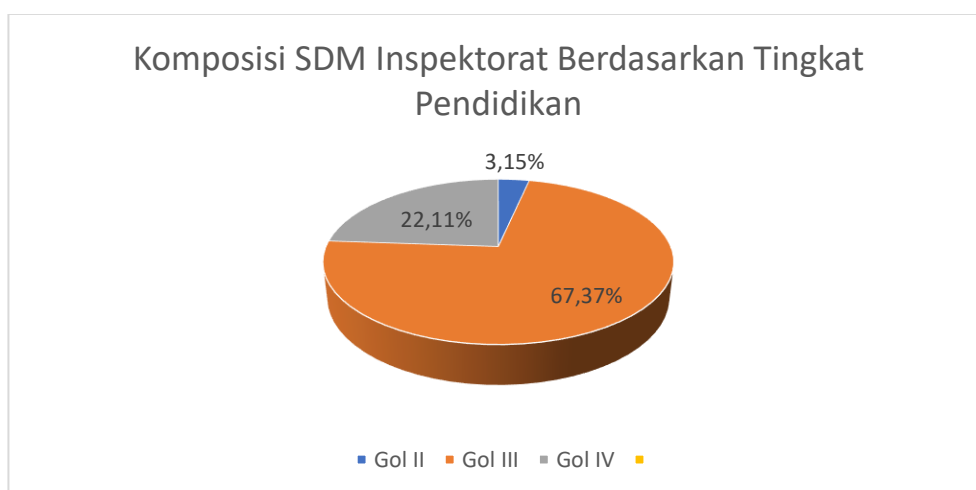
Gambar 2.8  
Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 36.84% telah menyelesaikan pendidikan S2, dan 58.95 % berpendidikan S1, 1.05% berpendidikan D3 dan 3.16% berpendidikan SLTA.

## 7. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Gambar 2.9  
Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang



Komposisi pegawai di Inspektorat berdasarkan golongan, sebanyak 22.11% berada pada golongan IV, pada golongan III 67.37% dan golongan II sebanyak 3.15%.

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Garut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dikaitkan dengan target dalam Renstra Inspektorat Daerah.

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Garut**

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Inspektorat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Pengawasan		Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	
2	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	



## **2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pelaksanaan peran Inspektorat sebagai sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pengawasan internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun eksternal lembaga, antara lain:

1. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang disebabkan oleh belum profesionalnya aparatur pemerintahan daerah, aparat pengawasan, dukungan peraturan perundangan, serta kesadaran hukum masyarakat;
2. Belum sinerginya sistem pengawasan internal pemerintah yang menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pemeriksaan/pengawasan. Hal ini perlu adanya koordinasi diantara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
3. Masih terbatasnya tenaga yang professional dibidang pengawasan yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor, dimana masih adanya kesulitan dalam tingkat kelulusan yang masih tergantung dari rekomendasi dari BPKP serta Jabatan P2UPD.
4. Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan perundangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang.
5. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini berakibat masih rendahnya tingkat penyelesaiannya.
6. Masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	44

dan Masih rendahnya tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

7. Masih ada ASN yang mempunyai sikap Mental dan Budaya Korupsi serta Upaya dan komitmen Pemerintah Daerah dan Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN belum optimal
8. Masih belum optimalnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah sehingga level maturitas SPIP masih pada tingkat berkembang;
9. Masih rendahnya efisiensi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
10. Masih terjadinya praktik-praktik pungli yang terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat;
11. Tingginya jumlah pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah desa;
12. Belum memadainya Sarana dan Prasarana penunjang pengawasan;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan, maka peningkatan kinerja

organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan peran APIP dalam memberikan peringatan dini (*early warning system*) melalui pengawasan dan *consulting partner*;
- b. Peningkatan Kapabilitas APIP;

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	45

- c. Peningkatan peran pengawasan APIP dalam mengawal implementasi SPIP;
- d. Mewujudkan implementasi SAKIP SKPD yang efisien;
- e. Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
- f. Optimalisasi fasilitasi Tim Saber Pungli Kabupaten;
- g. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang pengawasan.
- h. Peningkatan efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- i. Percepatan penanganan Pengaduan Masyarakat;
- j. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

**2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Inspektorat disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	46

Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2023 telah sesuai
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 3 program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
  - c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 33 sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 33.488.167.660,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 33.026.201.899,00.

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	47

5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

<b><i>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</i></b>	48

**Tabel 2.8**

**Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023**

Provinsi/Kabupaten/Kota : Garut

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	UNSUR PENGAWASAN									
6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Kab. Garut	> 4 Indeks	21.681.917.260	21.219.951.499	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	34.590.166.072

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>6.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>167.458.600</b>	<b>167.458.600</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>168.062.800</b>
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut	8 Dokumen	53.752.800	53.752.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	57.650.800
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	1 Laporan	113.705.800	113.705.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	110.412.000
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>16.650.255.824</b>	<b>16.188.290.063</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>16.667.726.522</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	97 Orang/Bulan	16.602.645.824	16.140.680.063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	16.620.116.522
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	47.610.000	47.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	47.610.000
<b>6.1.1.01.2.03</b>	<b>Administrasi barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>188.239.886</b>	<b>185.239.886</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>185.239.950</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	185.239.886	185.239.886	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	185.239.950
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>2.307.560.800</b>	<b>2.307.560.800</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>2.453.124.800</b>
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut	110 Paket	197.264.800	197.264.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	191.128.800
6.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garut	97 Orang	2.110.296.000	2.110.296.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	2.261.996.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>1.673.521.900</b>	<b>1.673.521.900</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>2.217.112.800</b>
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	15.446.700	15.446.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	15.446.700
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	707.636.000	707.636.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	1.278.436.000
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Garut	1 Paket	24.876.800	24.876.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	22.794.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Garut	2 Paket	232.572.000	232.572.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	228.887.400
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Garut	3 Dokumen	49.305.000	49.305.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	29.305.000
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	4 Laporan	261.250.000	261.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	261.250.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	4 Laporan	355.782.000	355.782.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	354.340.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut	1 Dokumen	26.653.400	26.653.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	26.653.400
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>299.769.200</b>	<b>299.769.200</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>12.420.519.200</b>
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Garut	1 Unit	299.769.200	299.769.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	320.519.200
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut	1 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	12.100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>287.171.050</b>	<b>287.171.050</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>367.440.000</b>
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut	4 Laporan	10.088.800	10.088.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	7.260.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut	4 Laporan	99.525.000	99.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	175.450.000
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut	4 Laporan	30.220.000	30.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	30.050.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Laporan	147.337.250	147.337.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	154.680.000
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>110.940.000</b>	<b>110.940.000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>		<b>&gt; 4 Indeks</b>	<b>110.940.000</b>
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Kab. Garut	43 Unit	110.940.000	110.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		> 4 Indeks	3.423.604.593

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Kab Garut	>4 Indeks	9.573.727.400	9.573.727.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	8.922.852.593
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Kab Garut	>4 Indeks	7.813.119.900	7.813.119.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	7.337.957.593
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Garut	75 laporan	3.658.939.900	3.658.939.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	3.423.604.593
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Garut	5 Laporan	990.325.000	990.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	1.107.300.000

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	58
---	----

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	Kab Garut	1 Laporan	20.500.000	20.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	27.133.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	Kab Garut	2 laporan	217.880.000	217.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	217.880.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab Garut	168 laporan	2.109.700.000	2.109.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	1.751.540.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab Garut	500 Dokumen	815.775.000	815.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	810.500.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Kab Garut	>4 Indeks	1.760.607.500	1.760.607.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	1.584.895.000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab Garut	8 Laporan	1.760.607.500	1.760.607.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	>4 Indeks	1.584.895.000
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kab Garut	89%	2.232.523.000	2.232.523.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	2.342.423.500
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat	Kab Garut	89%	529.243.000	529.243.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	529.243.000

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	60
---	----

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<b>Waktu dan Sesuai Ketentuan</b>								
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Kab Garut	3 Rekomendasi	529.243.000	529.243.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	529.243.000
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Kab Garut</b>	<b>89%</b>	<b>1.703.280.000</b>	<b>1.703.280.000</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>	<b>-</b>	<b>89%</b>	<b>1.813.180.500</b>
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan pemerintahan Daerah	Kab Garut	75 Perangkat	247.095.000	247.095.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	526.860.000

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	61
---	----

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab Garut	15 Perangkat Daerah	228.473.000	228.473.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	221.378.000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab Garut	1 Kegiatan	998.867.500	998.867.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	679.757.500
6.01.03.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab Garut	8 Perangkat Daerah	228.844.500	228.844.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	89%	385.185.000
					<b>33.488.167.660</b>	<b>33.026.201.899</b>				<b>45.855.442.165</b>

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Inspektorat Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Inspektorat tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	63
--	----

program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Inspektorat yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

<i>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</i>	64

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
  - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;

- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
    - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
    - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
    - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
    - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
  4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
    - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
  5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
    - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
    - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus

<i>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</i>	66

pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.



Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan unsur Pengawasan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	<b>68</b>
--	-----------

**Tabel 3.1****Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah**

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>YARGET KINERJA TAHUN 2023</b>
1.	Meningkatnya tata Kelola dan Profesionalisme Pengawasan		1. Indeks Penguatan Pengawasan	6,5
		1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan	1. Indeks Kepuasan Pengawasan	Sangat Baik
		2. Meningkatkan Profesionalisme Pengawasan	1. Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Sangat Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini

dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan**  
**RENJA Tahun 2023**

N o	Perangkat Daerah	Progra m	Kegiata n	Sub Kegiata n	Pagu
1	Inspektora t	3	12	33	33.026.201.89 9

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah.

1. Jumlah program sebanyak 3 program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
  - c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.
2. Jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan;
3. Jumlah sub kegiatan sebanyak 33 subkegiatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	70
--	----

Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp.33.026.201.899,-,

Adapun Rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 berikut ini:

<b><i>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</i></b>	71

**Tabel 3.3**

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Garut  
Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah**

**Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lok asi Out put Keg iatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)			
						Sebe lum	Sesu dah	Sebelu m	Sesuda h	Sebel um	Sesud ah										
6		<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																			
6	1	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>														33,488,167,660	33,026,201,899		45,855,442,165		
6	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														21,681,917,260	21,219,951,499		34,590,166,072	
6	1	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>														167,458,600	167,458,600		168,062,800
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kepuasan aparatur terhadap aspek Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	> 4 Indeks	> 4 Indeks	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	100 %	53,752,800	53,752,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	57,650,800

6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kepuasan aparatur terhadap aspek Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	113,705,800	113,705,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	110,412,000
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>16,650,255,824</b>	<b>16,188,290,063</b>				<b>16,667,726,522</b>	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	> 4 Indeks	> 4 Indeks	97 Orang /bulan	97 Orang /bulan	100 %	100 %	16,602,645,824	16,140,680,063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	16,620,116,522

6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	> 4 Indeks	> 4 Indeks	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	47,610,000	47,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	47,610,000
																	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									<b>185,239,886</b>	<b>185,239,886</b>				<b>185,239,950</b>	
6	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pengamanan Barang Milik Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	185,239,886	185,239,886	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	185,239,950
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									<b>2,307,560,800</b>	<b>2,307,560,800</b>				<b>2,453,124,800</b>	

6	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan jam Pendidikan dan Pelatihan serta kelengkapan pakaian dan atributnya	> 4 Indeks	> 4 Indeks	110 Paket	110 Paket	100 %	100 %	197,264,800	197,264,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	191,128,800
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan jam Pendidikan dan Pelatihan serta kelengkapan pakaian dan atributnya	> 4 Indeks	> 4 Indeks	97 Orang	97 Orang	100 %	100 %	2,110,296,000	2,110,296,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	2,261,996,000
6	1	1	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>1,673,521,900</b>	<b>1,673,521,900</b>			<b>2,217,112,800</b>	



6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	15,446,700	15,446,700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	15,446,700
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	707,636,000	707,636,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	1,278,436,000
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	24,876,800	24,876,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	22,794,300

6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	232,572,000	232,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	228,887,400
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	49,305,000	49,305,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	29,305,000
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	261,250,000	261,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	261,250,000

6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	355,782,000	355,782,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	354,340,000
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	26,653,400	26,653,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	26,653,400
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>299,769,200</b>	<b>299,769,200</b>				<b>12,420,519,200</b>	
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya kepuasan aparatur terhadap aspek pemenuhan sarana dan	> 4 Indeks	> 4 Indeks	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	299,769,200	299,769,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	320,519,200



6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	99,525,000	99,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	175,450,000
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	30,220,000	30,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	30,050,000
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Aparatur terhadap aspek pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	> 4 Indeks	> 4 Indeks	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	147,337,250	147,337,250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	154,680,000

6	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										110,940,000	110,940,000				110,940,000		
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Kepuasan Aparatur terhadap pemenuhan aspek Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Daerah		> 4 Indeks	> 4 Indeks	43 Unit	43 Unit	100 %	100 %	110,940,000	110,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Aparatur Pengawasan	> 4 Indeks	110,940,000
6	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										9,573,727,400	9,573,727,400				8,922,852,593		
6	1	2	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal										7,813,119,900	7,813,119,900				7,337,957,593		
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irbn I, II, III, IV, dan Irbn Investigasi dan Pengaduan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kepuasan pengawasan terhadap aspek penyelenggaraan pengawasan internal		> 4 Indeks	> 4 Indeks	75 Laporan	75 Laporan	100 %	100 %	3,658,939,900	3,658,939,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irbn I, II, III, IV, dan Irbn Investigasi dan Pengaduan)	> 4 Indeks	3,423,604,593

6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kepuasan pengawasan terhadap aspek penyelenggaraan pengawasan internal	> 4 Indeks	> 4 Indeks	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	990,325,000	990,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	> 4 Indeks	1,107,300,000
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Meningkatnya kepuasan pengawasan terhadap aspek penyelenggaraan pengawasan internal	> 4 Indeks	> 4 Indeks	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	20,500,000	20,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	> 4 Indeks	27,133,000
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Meningkatnya kepuasan pengawasan terhadap aspek penyelenggaraan pengawasan internal	> 4 Indeks	> 4 Indeks	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	217,880,000	217,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	> 4 Indeks	217,880,000

6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irbn I, II, III, IV, dan Irbn Investigasi dan Pengaduan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Meningkatnya kepuasan pengawasan terhadap aspek penyelenggaraan pengawasan internal	> 4 Indeks	> 4 Indeks	168 Laporan	168 Laporan	100 %	100 %	2,109,700,000	2,109,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irbn I, II, III, IV, dan Irbn Investigasi dan Pengaduan)	> 4 Indeks	1,751,540,000
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irbn I, II, III, IV, dan Irbn Investigasi dan Pengaduan)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatnya kepuasan pengawasan terhadap aspek penyelenggaraan pengawasan internal	> 4 Indeks	> 4 Indeks	500 Dokumen	500 Dokumen	100 %	100 %	815,775,000	815,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irbn I, II, III, IV, dan Irbn Investigasi dan Pengaduan)	> 4 Indeks	810,500,000
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>											<b>1,760,607,500</b>	<b>1,760,607,500</b>			<b>1,584,895,000</b>	



6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap aspek tindak lanjut pengaduan masyarakat	> 4 Indeks	> 4 Indeks	8 Laporan	8 Laporan	100 %	100 %	1,760,607,500	1,760,607,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Indeks Kepuasan Pengawasan (Lingkup Irban I, II, III, IV, dan Irban Investigasi dan Pengaduan)	> 4 Indeks	1,584,895,000
6	1	3			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>										<b>2,232,523,000</b>	<b>2,232,523,000</b>				<b>2,342,423,500</b>
6	1	3	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>										<b>529,243,000</b>	<b>529,243,000</b>				<b>529,243,000</b>
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan	89 %	89 %	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1 Dokumen	1 Dokumen	529,243,000	529,243,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	89 %	529,243,000
6	1	3	2.02		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>										<b>1,703,280,000</b>	<b>1,703,280,000</b>				<b>1,813,180,500</b>

6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi terhadap Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		89 %	89 %	75 perangkat daerah	75 perangkat daerah	100 %	100 %	247,095,000	247,095,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	89 %	526,860,000
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi terhadap Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		89 %	89 %	15 perangkat daerah	15 perangkat daerah	100 %	100 %	228,473,000	228,473,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	89 %	221,378,000

6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi terhadap Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		89 %	89 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	100 %	998,867,500	998,867,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	89 %	679,757,500
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi terhadap Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		89 %	89 %	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	100 %	100 %	228,844,500	228,844,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	89 %	385,185,000
<b>TOTAL</b>															<b>33,488,167,660</b>	<b>33,026,201,899</b>					<b>45,855,442,165</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; v) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

<b>Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023</b>	87
--	----

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN